48

STRATEGI KEHUTANAN INDONESIA MENGHADAPI PENERAPAN EKOLABELING DAN PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL

Dudung Darusman
(Dekan Fakultas Kehutanan IPB)

Makalah sebagai bahan Diskusi Ilmiah di Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti, Kampus Jatinangor, 19 Juli 1995

EKOLABELING DAN GLOBALISASI

Ekolabeling adalah penerapan/pencantuman label/tanda terhadap suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut dihasilkan melalui proses produksi dan manajemen yang baik dan memenuhi persyaratan ekologis/ekosistem.

Ekolabeling bermula dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup semua sistem alam semesta, khususnya dunia ini. Lingkungan hidup ini berkembang dari waktu ke waktu, yang semula terdiri hanya unsur-unsur alami menjadi semakin luas mencakup unsur-unsur manusiawi dan sosial kemasyarakatan. Kalau semula berkisar pada kepentingan kelestarian sumberdaya pohon, kemudian selanjutnya pada kelestarian hutan, pada *biodiversity*, sampai kepada sosio-antropologis masyarakat disekitarnya.

Gerakan ekolabeling ini jelas baik niat dan tujuannya, sehingga perlu didukung, karena manusia tidak bisa lepas keluar dari ekosistemnya. Penghindaran terhadap ekolabeling (yang niat dan tujuannya tidak menyimpang) sama seperti lari terbebas sementara, dan pada saatnya masalah akan segera menghadang juga. Kalupun tidak sempat menghadang kita, maka pasti akan menghadang saudara kita di tempat lain atau anak cucu-cucu kita di waktu mendatang.

Globalisasi adalah proses pembukaan/pelepasan batas-batas lokal dan nasional menuju kompetisi dan atau kerjasama internasional. Dalam perjalanan waktu, keterbatasan/ketertutupan lokal dan nasional semakin ditinggalkan manusia karena membatasi perkembangan kemajuan, akibat sumber-sumber lokal dan nasional pada kenyataannya perlu dikombinasikan dengan sumber-sumber produksi lainnya dari luar untuk dapat menghasilkan produksi yang efisien. Produksi yang efisien diartikan dapat cukup menyediakan produk bagi konsumen yang terus bertambah banyak, dengan menggunakan input produksi (sumber-sumber) yang semakin bertambah.

Baik kompetisi maupun kerjasama global ke arah peningkatan efisiensi tersebut di atas tidak hanya terjadi pada perdagangan internasional saja, tetapi juga pada seluruh kegiatan produksi, dari bahan baku sampai industri pengolahan yang menghasilkan produk akhir yang diperdagangkan.

RESPON PROFESI KEHUTANAN TERHADAP EKOLABELING DAN GLOBALISASI

Dalam menghadapi gerakan ekolabeling, profesi kehutanan harus tetap penuh kesadaran tentang tugas profesinya, tidak terbawa arus luar dan tidak lupa tugas-tugasnya ke dalam. Profesi kehutanan jangan sampai terlena memperhatikan indikator-indikator luar dan lupa menggarap dengan sungguh-sungguh kegiatan pengelolaan hutan dan industrinya sendiri.

Profesi kehutanan memang perlu terus mengikuti perkembangan tuntutan-tuntutan dari luar, sambil terus secara aktif bersama pihak non-kehutanan merumuskan dengan benar arah, tujuan dan prosedur ekolabeling. Namun harus selalu ingat bahwa sekalipun arah, tujuan dan prosedur ekolabeling dapat dirumuskan dengan baik, permasalahan pokoknya tidak akan selesai tanpa profesi kehutanan mengerjakan tugas-tugas pengelolaan hutan dan industrinya dengan sebaik-baiknya. Di samping itu juga harus selalu diingat bahwa hasil dari suatu kegiatan pengelolaan di bidang kehutanan baru akan dilihat hasilnya (dan diukur kesesuaiannya dengan ekolabeling) setelah waktu yang sangat lama.

Bahkan penting sekali diingat, bahwa apabila tugas-tugas pengelolaan hutan dan industrinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para profesional kehutanan, maka tuntutan ekolabeling akan terpenuhi, dan *pressures*/tekanan dari luar kehutanan akan berhenti dengan sendirinya. Dengan demikian keseluruhan sistem justru akan jauh lebih efisien.

Sementara itu proses globalisasi membawa kita pada hubungan kerjasama dan kompetisi bisnis internasional. Disini perlu diingat bahwa apabila posisi/kontribusi kita lemah/di bawah maka bentuk kerjasamanya akan bersifat "dikerjai sama-sama" atau berada pada keadaan selalu dirugikan.

Kita harus terlebih dahulu mengetahui dan menyadari dimana letak keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita sendiri, khususnya di bidang kehutanan. Dengan begitu kita dapat berupaya mengatasi kelemahan dan memanfaatkan (memainkan) kelebihan dalam berkompetisi dan bekerjasama pada tingkat internasional. Dengan demkian hutan dan kehutanan dapat diharapkan menjadi sarana perjuangan dalam mengahadapi persaingan globalisasi, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang politik dan kebudayaan.

Khusus dalam bidang ekonomi, globalisasi telah dan akan terus memacu persaingan efisiensi produksi, pemasaran dan diplomasi internasional. Dalam persaingan produksi, kelebihan atau keunggulan relatif Bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia terletak dalam hal keunggulan kepemilikan bahan baku yang berlimpah, murah dan berkwalitas baik, seperti halnya sumberdaya hutan.

Dalam waktu yang masih panjang diperkirakan Indonesia akan tetap menyandarkan kekuatan persaingan pada keunggulan kepemilikian bahan baku tersebut, terutama yang berkaitan dengan keberadaan sumberdaya alamnya. Bangsa lain akan menghargai kita tinggi (dan kita akan memperoleh keuntungan yang tinggi) bila kita dapat memelihara sumberdaya alam tersebut dan memainkannya dengan tepat pada persaingan internasional.

Dalam perang diplomasi internasional kedudukan sumberdaya hutan alam tropika yang sangat penting bagi keberadaan seluruh umat manusia di dunia, dapat dijadikan alat dan media diplomasi yang sangat objektif (tidak subjektif mengada-ada), sehingga Bangsa Indonesia dapat memetik manfaat hubungan internasional yang semakin produktif dan menguntungkan, karena keberadaan hutannya yang masih luas dan relatif utuh.

Dengan menyadari kelemahan dan keunggulannya, khususnya di bidang kehutanan, sesungguhnya Bangsa Indonesia dan para profesional kehutanan yang mendukungnya dapat mempertahankan keberadaan dan mengelola hutan semaksimal mungkin, karena dengan demikian keunggulan ekonomi, politik dan budaya Bangsa Indonesia di antara berbagai bangsa di dunia dapat terus ditingkatkan.

Ekolabeling dalam jangka pendek memang mengeluarkan biaya atau pengorbanan. Ungkapan-ungkapan bahwa bila ekolabeling benar-benar dilaksanakan maka biaya produksi akan naik berulang kali diungkapkan oleh para pengusaha dan rimbawan di lapangan. Tapi kita tetap harus ingat bahwa dalam jangka panjang ekolabeling justru akan menguntungkan kita. Bukankah kita telah betul-betul merasakan dan menyadari bahwa hutan alam yang selama ini kita panen - *yang secara alami telah memenuhi prinsip ekologis/ekosistem atau memenuhi kriteria ekolabeling* - telah selama 25 tahun lebih memberi kelimpahan bahan baku kayu yang termurah dan paling kompetitif dibandingkan dengan hutan manapun di dunia.

Ekolabeling jelas akan menunjang kekuatan kompetisi dan kerjasama internasional kehutanan Indonesia dalam menghadapi proses globalisasi. Ekolabeling dan globalisasi dapat menjadi dua sisi yang saling mengisi, apabila difahami dan dihadapi dengan benar. Jadi, dalam menghadapi ekolabeling dan globalisasi, kita semua haruslah berpikir positif, berbaik sangka dan optimistik, disertai keteguhan dan ketekunan kerja khas kehutanan atau rimbawan.

Dalam situasi seperti sekarang ini, jangan menjadi bimbang, jangan dapat ditunggangi oleh pihak-pihak yang memancing di air keruh, yang berkehendak mengambil keuntungan jangka pendek dengan tidak peduli kesulitan dan kehancuran di masa yang akan datang. Mereka-mereka yang hanya berpikir keuntungan jangka pendek mungkin sekali adalah mereka yang bodoh/dungu, atau mungkin pula mereka yang pada saatnya nanti berniat lari dari Indonesia, yang dirasakan bukan sebagai tanah airnya.

STRATEGI MENGHADAPI EKOLABELING DAN GLOBALISASI

Dari uraian di muka, dapat ditegaskan kembali bahwa dalam menghadapi ekolabeling dan globalisasi kehutanan Indonesia jangan sampai terjebak dan terhanyut pada strategi partial (sebahagian-sebahagian menurut kondisi dan permasalahan yang sedang hangat dan menjadi issue saja), tetapi harus tetap terikat pada strategi integral (menyeluruh, sistematika dan profesional). Strategi partial yang didasarkan pada reaksi terhadap tekanan-tekanan kondisional jelas menunjukkan ketidakprofesionalan orang kehutanan, atau dengan kata lain menjadi amatiran.

Langkah-langkah Departemen Kehutanan membentuk Lembaga Ekolabel Indonesia dan mengadakan antikampanye pemboikotan kayu tropis ke berbagai negara, serta upaya terus-menerus APHI menyebarkan informasi ke berbagai forum internasional, dapatlah diteruskan. Tapi itu semua tidak cukup dan tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya.

Untuk itu, berikut ini akan dikemukakan tantangan dan permasalahan yang akan mendasari strategi yang diharapkan bersifat *intregrated* tersebut. Tantangan kehutanan Indonesia sesungguhnya berpusat kepada kepentingan berbagai aspek efisiensi pengelolaan hutan dan industrinya.

Apabila seluruh aspek efisiensi pengelolaan yang dimaksud dapat ditingkatkan dan memenuhi harapan, maka ekolabeling dapat kita lewati dan globalisasi dapat kita atasi. Sebaliknya, bila seluruh aspek tersebut, atau sekalipun hanya sebahagian saja, tidak mampu kita tingkatkan sampai level yang diharapkan maka masalah ekolabeling dan globalisasi akan terus berlanjut dan bertambah berat.

Kehutanan Indonesia dari waktu ke waktu terus menghadapi tantangan-tantangan yang bertambah berat, baik di tingkat lokal/perusahaan, nasional maupun internasional. Tantangan-tantangan tersebut dapat dirumuskan menjadi tantangan untuk mencapai peningkatan aspek-aspek efisiensi sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi pengusahaan hutan, yang meliputi :
   a. Produktivitas fisik : pertumbuhan dan keberhasilan pembinaan hutan, pengurangan limbah, dan sebagainya.
   b. Efisiensi ekonomi : peningkatan daya kompetisi.
   c. Efisiensi finansial : peningkatan keuntungan.

2. Efisiensi nasional, yang meliputi :
   a. Peningkatan penerimaan Pemerintah (Pusat dan Daerah), untuk membiayai pembangunan.
   b. Peningkatan PDRB dan lapangan kerja di sektor kehutanan
   c. Pemerataan pendapatan, lapangan kerja dan kesempatan berusaha, khususnya bagi pengusaha kecil dan koperasi setempat.
   d. Peningkatan dan penyeimbangan struktur industri kehutanan, dari hulu sampai ke hilir.
   e. Penyeimbangan yang proporsional peranan BUMN, swasta dan koperasi.
   f. Pertumbuhan dan penyeimbangan pembangunan antar daerah.

3. Efisiensi pemeliharaan kapasitas lingkungan hidup, seperti : atmosfer yang semakin bersih, siklus hidrologi yang semakin baik, kesuburan tanah semakin terpelihara, dan sebagainya.

4. Efisiensi pemeliharaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), yakni tetap manjaga ketersediaan selengkap mungkin sumberdaya genetik untuk kesejahteraan generasi yang akan datang.

Kedua peningkatan aspek efisiensi yang terdahulu pada dasarnya adalah tantangan dari dalam, sedangkan dua aspek yang terakhir adalah tantangan dari luar. Walaupun antara keduanya saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Bahkan keberhasilan menghadapi tantangan dari luarpun akan memberi manfaat yang positif bagi kemampuan menghadapi tantangan dari dalam.

Selanjutnya perlu difahami bahwa dalam menghadapi tantangan peningkatan efisiensi dalam berbagai aspeknya tersebut di atas, kehutanan Indonesia berhadapan dengan beberapa permasalahan yang cukup berat, diantaranya sebagai berikut.

1. ***Pengurangan luas dan kualitas hutan.***

   Masalah kelestarian hutan pada hakikatnya adalah konflik penggunaan lahan (*land use conflict*), dimana inti permasalahannya adalah bagaimana agar hutan secara relatif lebih unggul dibandingkan dengan non-kehutanan di mata masyarakat dan para pengambil keputusan. Permasalahannya berpangkal pada peningkatan efisiensi pengelolaan yang ada, penggalian manfaat-manfaat baru yang berarti bagi masyarakat, seperti misalnya : tumbuhan obat, tumbuhan hias, rekreasi, air bersih, dsb.

2. ***Membudayanya efisiensi yang rendah dalam pengusahaan hutan industrinya.***

   Ketentuan-ketentuan yang berlaku masih cenderung kurang merangsang peningkatan efisiensi dan tetap mempertahankan pengusaha-pengusaha dan tenaga kehutanan yang kurang profesional, kurang produktif dan kurang efisien. Dunia usaha HPH dan industri kehutanan seharusnya segera diarahkan kepada suasana yang kompetitif agar semakin efisien, yang akan memberi manfaat yang lebih besar dengan menggunakan hutan sehemat mungkin.

3. ***Ketidakseimbangan sarana dan prasarana pembangunan antar daerah.***

   Kebijaksanaan pembangunan antar daerah pada waktu-waktu yang lalu kurang memperhatikan pemerataan sarana dan prasarana pembangunan antar daerah, walaupun akhir-akhir ini masalah pemerataan tersebut semakin diperhatikan. Namun demikian masih ada ketentuan-ketentuan yang masih cenderung menciptakan ketidakseimbangan insentif pembangunan antar daerah, dimana kemampuan daerah yang berbeda-beda mendapat perlakuan (insentif dan disinsentif) yang sama, misalnya kewajiban pungutan pajak, dsb.

4. ***Dominasi pengusaha besar di kehutanan.***

   Pelaku bisnis kehutanan di tanah air ini didominasi oleh pengusaha-pengusah besar, bahkan sangat besar, dimana beberapa kelompok pengusaha terbesar di tanah air ini adalah juga pelaku bisnis kehutanan. Kenyataan menunjukkan bahwa seluruh hutan produksi yang berluas 64 juta Ha secara resmi telah terbagi habis, tidak ada yang tersisa bagi pengusaha berukuran menengah dan kecil.
   Struktur pelaku usaha yang sangat ekstrim timpang ini saya yakin hanya terjadi di sektor kehutanan. Sektor-sektor lain sudah sejak lama berusaha menghindarinya, dan berusaha membina pengusaha menengah dan kecil, serta koperasi, demi kekuatan dan ketangguhan perekonomian di sektor itu sendiri.

Dengan memahami secara mendalam tantangan-tantangan dan permasalahan yang dihadapi seperti seperti diuraikan di atas, kiranya dapat dirumuskan strategi kehutanan yang bersifat integral, yang perlu ditempuh dimasa yang akan datang. Beberapa hal penting dalam strategi kehutanan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi produksi kehutanan, melalui penerapan teknologi dan manajemen tepat guna oleh tenaga profesional kehutanan yang baik, yang tidak hanya mencakup kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan hasil hutan, tetapi juga dalam kegiatan industri pengolahan dan

pemasarannya, baik di dalam negeri maupun internasional. Beberapa contoh nyata adalah misalnya : pertumbuhan jenis-jenis Meranti yang sekarang sekitar 1 - 2 m^3/ha/tahun dapat ditingkatkan sampai 8 - 15 m^3/ha/tahun; limbah pemanenan yang sekarang masih sekitar 50 % dapat diturunkan menjadi 25 %, sedangkan di industri pengolahan kayu masih dapat diturunkan lagi dari sekitar 40 % sampai 10 % saja. Demikian pula dalam pemasaran, sistem yang sekarang masih rendah memberi pendapatan kepada pihak produsen, dan masih sangat potensial untuk ditingkatkan.

2. Menata kelembagaan (kebijaksanaan dan aturan main) yang ada, sehingga dapat membuka kesempatan usaha kepada lebih banyak pihak dan lebih banyak jenis usaha yang dapat dilakukan, serta dapat membuka suasana usaha yang lebih kompetitif.

3. Mencari dan mengembangkan produk-produk kehutanan yang baru, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*, yang selama ini kurang dikenal di pasar hasil hutan, sehingga dapat meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari hutan.

4. Mengembangkan banyak jenis usaha kehutanan dan industrinya yang berskala menengah dan kecil serta koperasi, terutama untuk masyarakat setempat. Hal ini sesungguhnya sangat sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat yang bersifat marjinal, sesuai pula dengan tradisi mata pencaharian dan budaya masyarakat yang dekat dengan alam, sebagaimana keadaan pada umumnya di Indonesia, terutama di luar Jawa.

5. Menyadari dan mengetahui secara tegas besarnya nilai-nilai manfaat hutan yang sekarang ini belum atau kurang diketahui dan dipasarkan. Memang betul betapa besarnya nilai manfaat-manfaat tersebut bagi umat manusia, namun masalahnya kebanyakan umat manusia tidak menyadari dan mengetahuinya, sehingga tidak memperhitungkan pentingnya hutan dalam kehidupannya.

6. Merubah atau menggeser sikap masyarakat dan para pengambil keputusan terhadap makna kemajuan dan modernisasi. Kemajuan dan modernisasi hendaknya tidak diartikan menaklukan alam, tetapi lebih pandai memetik manfaat dari alam. Hal itu berarti tidak mengganggu dan merubah ekosistem alam, tetapi memanen lebih banyak jenis manfaat sebagai buah dari ekosistem alam yang ada, tanpa repot-repot merubahnya dulu. Bukankah hal itu menunjukkan semakin pandai dan cerdiknya manusia, sambil tetap sejalan dengan pemeliharaan keberadaan ekosistem alam yang ada.

Dengan sikap tersebut masyarakat tidak harus mengkonversi hutan menjadi lahan penggunaan yang lain, yakni dengan sistem budidaya yang menghasilkan produk banyak dan homogen, tetapi dari ekosistem hutan yang menghasilkan produk banyak namun heterogen. Dalam perjalanan waktu pula, manusia telah belajar dari pengalaman bahwa heterogenitas lebih memberi kekuatan dan ketahanan dibandingkan dengan homogenitas.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditegaskan kembali bahwa dalam menghadapi permasalahan ekolabeling dan globalisasi, profesi kehutanan tidak harus terjerumus dan terhanyut pada strategi partial dan jangka pendek, tapi harus tetap menyadari dan memahami secara tulus memegang teguh tugas-tugas pokok keprofesiannya, yang pada dasarnya berpusat pada peningkatan efisiensi pengelolaan hutan dan industrinya.

Uraian di atas telah mengemukakan tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi profesi kehutanan sekarang dan masa mendatang, yang apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sekaligus dapat mengatasi ujian ekolabeling dan kompetisi global dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Para rimbawan profesional kehutanan Indonesia, selamat bekerja dan berjuang !

BAHAN BACAAN

Darusman, Dudung. 1991. Laporan Penelitian Studi Permintaan Manfaat Rekreasi dari Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. Lembaga Penelitian IPB.

______________. 1992. Laporan Penelitian Studi Permintaan Manfaat Hidrologi dari Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. Lembaga Penelitian IPB.

______________. 1992. Economic Rent Pengusahaan Hutan di Indonesia. Makalah Utama pada Seminar Aspek Ekonomi Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan dan APHI. 6 dan 7 Oktober 1992 di Jakarta.

______________. 1992. Kebijaksanaan Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah. Makalah Pembahasan dalam Seminar Pengusahaan Sagu dan Nipah. 14 Mei 1992 di Jakarta.

______________. 1993. Sumbang Pikir : Determinasi Luas Hutan Minimal ?. Pertemuan Kerja Penyusunan Peta Arahan Penetapan Hutan Produksi Optimal. Dit-Jen Intag, Departemen Kehutanan. Tanggal 24 dan 25 Juni 1993 di Cisarua Bogor.

______________. 1993. Pemukiman Perambah Hutan yang Berwawasan Pembangunan Wilayah. Makalah pada Diskusi Terbatas "Pemukiman Masyarakat Perambah Hutan". Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Tanggal 4 Mei 1993 di Kalibata Jakarta.

______________. 1993. Small Scale Foresty and Forest Product Industry : Jawaban Komprehensif Terhadap Masalah Pembangunan di Propinsi Berlahan Marginal. Makalah Pembahas pada Seminar Pelestarian Hutan Produksi di Kalimantan Tengah. Yayasan Batang Garing dan APHI Kalimantan Tengah. Tanggal 4 Desember 1993 di Palangkaraya.

______________. 1994. Research and Education to Support the Sustainability of Forestry in Indonesia. Paper presented in the 1994 Tsukuba Asian Seminar on Agricultural Education (TASAE). September 25 to Oktober 8, 1994 at the University of Tsukuba, Japan.